

ABSTRAK

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada di dalam Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), sehingga perusahaan BUMN yang merupakan subjek hukum menjadi tidak mandiri. Adanya wewenang BPI Danantara sesuai dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada intinya BPI Danantara berwenang menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, sehingga menimbulkan konflik kepentingan, artinya kewenangan direksi diambil dalam peran penambahan penyertaan modal. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil pembahasan penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan BUMN berada di dalam kelembagaan BPI Danantara sehingga hal itu membawa akibat pada kewenangan Direksi perusahaan BUMN yang pada dasarnya sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam UU BUMN, Pasal 3F ayat 2 huruf b UU BUMN menyebutkan bahwa “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen*”. Dari pasal 3F ayat 2 huruf b tersebut menunjukkan bahwa BPI Danantara mengambil alih sebagian kewenangan dari Direksi, salah satunya terkait penyertaan modal. Hadirnya BPI Danantara membuat Direksi BUMN yang dibawah BPI Danantara tidak berdaya dimana Perusahaan BUMN memiliki status sebagai badan hukum sehingga bisa dikategorikan sebagai subjek hukum yang seharusnya memiliki kemandirian dalam pengelolaan yang terwujud dari kewenangan dan kemandirian direksi dalam mengurus perusahaan BUMN. Namun hadirnya BPI Danantara membuat Direksi perusahaan BUMN tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan usahanya dan justru perusahaan BUMN terikat pada BPI Danantara terutama terkait penambahan penyertaan modal.

Kata Kunci: Perusahaan BUMN, Kewengan Direksi, BPI Danantara

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (SOEs) are under the Danantara Investment Management Agency (BPI Danantara), thus rendering SOEs, as legal entities, less independent. The authority of BPI Danantara, as stipulated in Article 3F Paragraph 2, letter b of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (BUMN Law), essentially authorizes BPI Danantara to approve increases and decreases in capital participation in SOEs derived from dividend management. This creates a conflict of interest, meaning that the authority of the board of directors is taken over by the role of increasing capital contributions. Therefore, the authority of the Board of Directors of SOEs is increasingly weakened, or the board of directors lacks independence. Yet, the Board of Directors is the authority and responsibility for managing SOEs for the interests and objectives of the SOE, and represents the SOE both inside and outside the courts.

The research method used is normative juridical. The approach used in this study is the Statute Approach. In this research, we use prescriptive analysis to support arguments based on the results of the research.

The results of the research discussion indicate that state-owned enterprises (BUMN) are within the BPI Danantara institution, thus impacting the authority of the BUMN Board of Directors, who are essentially independent legal entities. Article 3F paragraph 2 letter b of the BUMN Law states that "In carrying out the duties referred to in paragraph (1), the Agency is authorized to: b. approve the addition and/or reduction of capital participation in BUMNs sourced from dividend management." Article 3F paragraph 2 letter b indicates that BPI Danantara has taken over some of the authority of the Board of Directors, one of which relates to capital participation. The presence of BPI Danantara renders the BUMN Board of Directors under BPI Danantara powerless, as BUMNs have legal entity status and can therefore be categorized as legal entities that should have independent management, manifested in the authority and independence of the directors in managing BUMNs. However, the presence of BPI Danantara means that the directors of state-owned enterprises (BUMN) lack full authority in running their businesses. Instead, the BUMNs are tied to BPI Danantara, particularly regarding additional capital contributions.

Keywords: BUMN, Directors' Authority, BPI Danantara